LAPORAN SOSIALISASI DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

 TAHUN 2021

2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI SUMATERA BARAT

BIDANG SDA DAN TTG

1/1/2021

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dimana Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 telah terselenggara pada tanggal 20 Desember 2021, di Hotel Pangeran Beach, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 79 Padang telah dapat disusun, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu perlu masukan, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan inspirasi dan semangat dalam pembangunan dan pengembangan Desa. Azas-azas yang menjadi dasar pengaturan Desa dikuatkan dengan kewenangan Desa yang akan memperkuat pondasi otonomi Desa, namun dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa diperlukan kejelasan fokus dan lokus dalam merefleksikan masalah dalam pembangunan Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan untuk dapat mengukur status perkembangan Desa mulai dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) berfokus pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa melalui aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi.

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) diharapkan mampu menjangkau seluruh dimensi kehidupan Desa/Nagari di Sumatera Barat sehingga dapat memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan serta memberi ruang bagi pembangunan Desa yang berkelanjutan namun lekat dengan nilai budaya dan karakteristik masing-masing Desa/Nagari, ketersediaan data dan pengukuran sebagai gambaran dimensi perkembangan Desa sangatlah dibutuhkan.

 Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung serta mencurahkan pikiran, sehingga Laporan ini dapat disusun dengan baik. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Padang, Desember 2021

**KEPALA BIDANG UEM DAN KAWASAN PERDESAAN**

 **DESRIANTO BOY, S.Pd.M.Si**

 Pembina Tk.I Nip. 19721228 199803 1 005

**DAFTAR ISI**

BAB I : PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. HASIL YANG DIHARAPKAN.

BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN.

1. DASAR PELAKSANAAN SOSIALISASI

2. ANGGARAN BIAYA.

3. WAKTU, TEMPAT DAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN.

A. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.

B. SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI DATA INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021

C. PESERTA SOSIALISASI.

BAB IV : PENUTUP.

1. KESIMPULAN

2. SARAN

DAFTAR LAMPIRAN.

DOKUMENTASI.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang.**

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkab diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan Nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali, Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan Nasional itu, dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa agar masyarakat terlepas dari ketertinggalan.

Kondisi ketertinggalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional juga termasuk dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga membutuhkan penanganan yang serius, salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah tidak diberikannya kesempatan yang memadai bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi ruang untuk dipraktekkan pada paradigma baru dalam pembangunan Desa di Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja secara dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

IDM dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Mengurangi jumlah Desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan lokus (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai partisipasi masyarakat yang berkolerasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologidan modal sosial.

Pasal 78 ayat (1) undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. **Maksud dan Tujuan.**
2. **Maksud.**

Maksud dari pelaksanaan Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Tahun 2021 adalah untuk membantu tataran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Nagari dalam menentukan lokus dan fokus strategi sasaran pembangunan dalam menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Nagari.

**2. Tujuan.**

1. Terpublikasikannya kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya tentang Klasifikasi Desa/Nagari di Sumatera Barat Tahun 2021 berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM).
2. Terpublikasikannya indikator-indikator yang mengakibatkan ketertinggalan Desa/Nagari di Sumatera Barat sesuai dengan Data Indeks Desa Membangun (IDM) kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya.
3. Terwujudnya komitmen bersama antara Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stakeholders lainnya untuk mendayagunakan data Indeks Desa Membangun sebagai basis data perencanaan program dan kegiatan di Desa/Nagari sehingga di akhir Tahun 2023 nanti, tidak ada lagi Nagari/Desa Sangat Tertinggal dan Nagari/Desa Tertinggal di Sumatera Barat.
4. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stakeholders lainnya untuk melakukan intervensi Program dan kegiatan di Nagari/Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumatera Barat.

2. Terwujudnya target pada akhir Tahun 2023 tidak ada lagi Desa/Nagari tertinggal di Sumatera Barat

3. Melalui peningkatan status Desa/Nagari mendukung terhadap terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan.

**BAB II**

**DASAR, ANGGARAN, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

1. **DASAR PELAKSANAAN PELATIHAN**
	1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ;
	2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
	3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Pendudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
	5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
	6. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
	7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
	8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

k. Undangan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/1017DPMD-2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

l. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dengan kode kegiatan 2.13.03.1.01.01.

**2. ANGGARAN BIAYA**

Pembiayaan kegiatan Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dengan kode kegiatan 2.13.03.1.01.01.

**3. WAKTU, TEMPAT DAN PELAKSANAAN PELATIHAN.**

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 dimana pesertanya berjumlah sebanyak 80 orang, yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala DPMD/N Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Nagari Development Center (NDC), Instansi Vertikal dan Dewan Pembina Pengembangan Nagari Se-Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Jalan Ir.H. Juanda Nomor 79 Padang.

**BAB III**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini meliputi penyampaian materi oleh 3 (tiga) orang narasumber, tanya jawab dan diskusi yang difasilitasi oleh Moderator oleh Kepala Bidang UEM,SDA dan TTG DPMD Provinsi Sumatera Barat.

1. **Susunan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

**NARASUMBER**

* 1. Bapak Mahyeldi Ansharullah, SP (Gubernur Sumatera Barat)

2. Bapak Amasrul, SH (Kepala Dinas PMD Prov. Sumbar)

3. Bapak Medi Iswandi, ST.MM (Kepala Bappeda Prov. Sumbar)

 **MODERATOR**

Bapak Desrianto Boy, S.Pd, M.Si (Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Prov. Sumbar).

 **JALANNYA ACARA**

Acara Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 diadakan pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di aula Hotel Pangeran Beach, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 79 Padang.

Tepat pukul 15.00 Wib Gubernur Sumatera Barat memasuki ruangan dan acara Pembukaan langsung dimulai dengan mendengarkan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh Narasumber dan seluruh undangan yang hadir.

Setelah mendengar lagu Indonesia Raya, penyampaian Laporan Panitia oleh Kepala Dinas PMD Prov. Sumbar (Bpk. AMASRUL, SH). Dalam laporannya pak Kadis menyampaikan antara lain Dasar Pelaksanaan Sosialisasi Data IDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, tujuan pelaksanaan sosialisasi, antara lain :

1. Terpublikasikannya kepada OPD Provinsi, Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya tentang klasifikasi Desa/Nagari di Sumatera Barat berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021.
2. Terpublikasikannya indikator-indikator yang mengakibatkan ketertinggalan Desa/Nagari di Sumatera Barat sesuai dengan Data Indeks Desa Membangun (IDM) kepada OPD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Stakeholder lainnya.
3. Terwujudnya komitmen bersama antara Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stakeholders lainnya untuk mendayagunakan data Indeks Desa Membangun sebagai basis data perencanaan program dan kegiatan di Desa/Nagari sehingga di akhir Tahun 2023 nanti, tidak ada lagi Nagari/Desa Sangat Tertinggal dan Nagari/Desa Tertinggal di Sumatera Barat.

Kepala Dinas juga menyampaikan Narasumber, peserta sosialisasi, tempat pelaksanaan sosialisasi serta pembiayaan kegiatan.

Selesai penyampaian laporan Panitia oleh Bapak Kepala Dinas dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi IDM.

Dalam sambutannya Bapak Gubernur menyampaikan bahwa ketertinggalan (under development) baik di daerah maupun masyarakat merupakan kenyataan sekaligus problematika pembangunan di semua daerah. Ketertinggalan tersebut merujuk pada tiga aspek yaitu alamiah, budaya dan struktural. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beliau berpandangan bahwa Desa telah mendapatkan angin segar untuk meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan.

Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efentif guna meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif Desa Membangun.

Melalui penyaluran dana Desa ini juga telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakat, dengan tujuan akhir menuju kemandirian dan perkembangan Desa.

Hasil pendataan yang telah dilakukan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal, Tahun 2016 sebanyak 51 Desa, Tahun 2021 sebanyak 3 Desa.
2. Desa Tertinggal, Tahun 2016 sebanyak 328 Desa, Tahun 2021 sebanyak 35 Desa.
3. Desa Berkembang, Tahun 2016 sebanyak 374 Desa, Tahun 2021 sebanyak 415 Desa.
4. Desa Maju, Tahun 2016 sebanyak 120 Desa, Tahun 2021 sebanyak 399 Desa.
5. Desa Mandiri, Tahun 2016 sebanyak 7 Desa, Tahun 2021 sebanyak 76 Desa.

Dari data di atas, ada 3 (tiga) Nagari Sangat Tertinggal yang berada di Kabupaten Solok Selatan.

Nagari/Desa yang sangat tertinggal dan tertinggal diakibatkan oleh tidak terpenuhinya indikator :

1. Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis di Nagari/Desa tidak ada/kurang memadai.
2. Jarak Tempuh sarana pendidikan dari pusat Nagari/Desa yang jauh.
3. Jumlah pusat pelatihan atau kursus di Nagari/Desa tidak tersedia.
4. Ruang Terbuka untuk publik di Nagari/Desa tidak tersedia.
5. Sarana Air Bersih Nagari/Desa kurang memadai.
6. Jalan Nagari/Desa tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat).
7. Jauhnya akses penduduk terhadap akses perdagangan.
8. Kurang tersedianya akses perbankan untuk masyarakat.
9. Rawan bencana dan kurangnya jumlah fasilitas mitigasi/tanggap bencana di Nagari/Desa.

Bapak Gubernur menegaskan agar OPD/stakeholders terkait menggunakan data IDM dijadikan basis data perencanaan pembangunan khususnya intervensi program dan kegiatan Tahun 2022 dan 2023. Di akhir sambutan Bapak Gubernur dengan ucapan Bismillahirahmanirrahim acara Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dibuka secara resmi.

 Acara selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (Bapak Amasrul, SH).

 Adapun judul materi pak Kepala DPMD adalah “Status Desa/Nagari Di Sumatera Barat Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021”

 Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi yang dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja yang jelas disertai indikatornya agar intervensi atau kebijakan yang diterapkan bagi Desa tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah Desa, yaitu Tipologi dan Modal Sosial Desa.

 Tujuan penyusunan IDM :

1. Untuk mengetahui status perkembangan setiap Nagari/Desa yang lekat dengan karakteristiknya.
2. Sebagai instrumen untuk efektivitas pencapaian target RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Pusat, OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Nagari/Desa.

Dimensi Pembentuk Indeks Desa Membangun

1. Lingkungan
2. Sosial
3. Ekonomi

Status perkembangan Desa Berdasarkan IDM

|  |  |
| --- | --- |
| STATUS DESA | RENTANG NILAI |
| MandiriMajuBerkembangTertinggalSangat Tertinggal | IDM > 0,81550,7072 < IDM ≤ 0,81550,5989 < IDM ≤ 0,70720,4907 < IDM ≤ 0,5989IDM ≤ 0,4907 |

REKAPITULASI DATA IDM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kab/Kota | Sangat Tertinggal | Tertinggal | Berkembang | Maju | Mandiri | Jumlah |
| 1. | Pesisir Selatan | 0 | 2 | 129 | 42 | 9 | 182 |
| 2. | Solok | 0 | 12 | 43 | 18 | 1 | 74 |
| 3. | Sijunjung | 0 | 0 | 28 | 24 | 9 | 61 |
| 4. | Tanah Datar | 0 | 0 | 7 | 51 | 17 | 75 |
| 5. | Padang Pariaman | 0 | 2 | 61 | 37 | 3 | 103 |
| 6. | Agam | 0 | 0 | 26 | 46 | 10 | 82 |
| 7. | Lima Puluh Kota | 0 | 2 | 19 | 53 | 5 | 79 |
| 8. | Pasaman | 0 | 1 | 21 | 11 | 4 | 37 |
| 9. | Kep. Mentawai | 0 | 13 | 22 | 5 | 3 | 43 |
| 10. | Dharmasraya | 0 | 3 | 24 | 20 | 5 | 52 |
| 11. | Solok Selatan | 3 | 0 | 12 | 17 | 7 | 39 |
| 12. | Pasaman Barat | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| 13. | Sawahlunto | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 27 |
| 14. | Pariaman | 0 | 0 | 6 | 47 | 2 | 55 |
|  | JUMLAH | 3 | 35 | 415 | 399 | 76 | 928 |
|  | PRESENTASE | 0,32% | 3,77% | 44,72% | 43,00% | 8,19% | 100% |

*Konsep percepatan kemajuan dan kemandirian Desa ;*- Desa Sasaran

 Desa sasaran ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Desa/Nagari melalui Pemerintah Kabupaten, sebagai sasaran percepatan kemajuan dan kemandirian Desa/Nagari.

* Sinergi Program Kegiatan

Sinergi program dan kegiatan dilakukan melalui proses perencanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan. Penyusunan sinergi ini mengacu pada peta intervensi (kondisi riil Desa/Nagari yang menjadi Desa/Nagari Sasaran).

* Pelaksanaan Kegiatan

Eksekusi pelaksanaan kegiatan oleh semua unsur baik Pemprov, Pemkab/Pemko, Pemdes/Pemnag, TNI/Polri, Swasta, Perguruan Tinggi, Perantau dan masyarakat sesuai dengan Tupoksi.

* Kemandirian Desa

Dengan adanya sinergi dan keseriusan di dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Nagari, maka akan terwujud kemandirian Desa/Nagari dan kesejahteraan masyarakat.

Narasumber berikutnya dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat (Bpk Medi Iswandi)

Dari paparannya antara lain disebutkan bahwa :

1. Visi Misi RPJMD 2021-2026 (Perda No 6 Tahun 2021)

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berkelanjutan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil / menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk mewujudkan visi ini ada beberapa program unggulan yang sudah dirancang, terkait dengan Indeks Desa Membangun ada beberapa program unggulan yang bisa dilaksanakan:

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari :

* Pendidikan (Misi I, Progul : 2,4,5,6,7,8)
* Kesehatan (Misi I, Progul : 1,3)
* Modal Sosial (Misi 2. Progul : 10,12)
* Permukiman (Misi 6, Progul : 21,22)

Indeks Ketahanan Ekonomi Keragaman Produksi Masyarakat

* Akses Pusat Perdagangan dan Pasar (Misi 4, Progul : 15,16)
* Akses Logistik (Misi 3, Progul : 14)
* Akses Perbankan dan Kredit (Misi 4, Progul : 17)
* Keterbukaan Wilayah (Misi 6, Progul : 21,22)

Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Kualitas Lingkungan

* Bencana Alam (Misi 6, Progul : 23)
* Tanggap Bencana (Misi 6, Progul : 23)
* Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa
* Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.
1. **Peserta Pelatihan.**

 Adapun Peserta Sosialisasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini berjumlah sebanyak 80 orang terdiri dari :

* 28 (Dua puluh delapan) orang dari Bappeda dan DPMD/N Kabupaten Kota Penerima Dana Desa.
* 28 (Dua puluh delapan) orang dari OPD Provinsi.
* 6 (enam) orang dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
* 2 .(dua) orang dari Dewan Pembina Pengembangan Nagari
* Akses Logistik (Misi 3, Progul : 14)
* Akses Perbankan dan Kredit (Misi 4, Progul : 17)
* Keterbukaan Wilayah (Misi 6, Progul : 21,22)

Indeks Ketahunan Ekologi / Lingkungan Kualitas Lingkungan

* Bencana Alam (Misi 6, Progul : 23)
* Tanggap Bencana (Misi 6, Progul : 23)
* Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa
* Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik

**BAB IV**

**P E N U T U P**

* 1. **KESIMPULAN**

Dari interaksi peserta dengan Narasumber muncul beberapa pertanyaan dari peserta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

* IDM merupakan Indek komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi yang menggambarkan status Desa/Nagari.
* Pengembangan IDM mampu menjangkau seluruh dimensi kehidupan Desa/Nagari di Sumatera Barat sehingga dapat memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan serta memberi ruang bagi pembangunan Desa/Nagari yang berkelanjutan namun lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik masing-masing Desa/Nagari, ketersediaan data dan pengukuran sebagai gambaran dimensi perkembangan Desa sangat dibutuhkan.
* IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja yang jelas disertai indikatornya sehingga intervensi atau kebijakan yang diterapkan bagi Desa/Nagari tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah Desa/Nagari.
	1. SARAN
1. Dengan telah dipublikasikannya data Indeks Desa Membangun Desa/Nagari se Sumatera Barat Tahun 2021 diharapkan adanya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan OPD Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang didukung oleh Perguruan Tinggi berbasis data ini sehingga terwujud Sumatera Barat Madani, yang Unggul dan Berkelanjutan.
2. Data IDM agar tetap bisa menggambarkan keadaan riil di lapangan, mohon diperbaharui setiap Tahun oleh Desa/Nagari di Sumatera Barat bersama Pendamping Desa.